

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Situasi ekonomi daerah menjadi semakin terbuka dan kehidupan menjadi lebih demokratis akan mempermudah pembangunan desa di masa depan. Namun sejauh ini, pandangan desa tidak berubah dari gambaran lamanya tentang kemiskinan dan keterbelakangan. Meskipun banyak orang mengakui bahwa desa memainkan peran penting di kota, desa diabaikan dari sudut pandang ekonomi dan lainnya. Guna mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri, masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah masalah kemiskinan. Pemerintah Indonesia selalu lebih memperhatikan masalah ini. Hal ini karena pemerintah menyadari pentingnya mengatasi masalah kemiskinan. Kegagalan dalam menyikapi masalah ini dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi dan politik di masyarakat (Nugrahani, 2019).

Status desa terkait dengan situasi dan kondisi juga dapat dikaitkan dengan faktor kerawanan dan kapasitas desa dalam mengelola potensi yang dimilikinya. Jika ada tekanan dari faktor kerawanan seperti guncangan ekonomi, bencana alam atau konflik sosial, akan mengalami penurunan status desa. Misalnya, jika faktor bencana tidak ditangani dengan tepat waktu dan tepat, atau jika konflik sosial berlangsung lama, status desa kemungkinan akan menurun. kapasitas desa untuk mengelola

daya, potensi, informasi/nilai spesifik, inovasi/inisiatif, dan kewirausahaan akan mendukung peningkatan status desa, misalnya dari desa berkembang menjadi desa maju (Setjonegoro, 2015).

Desa tertinggal perlu mengupayakan secara serius dan efektif menggunakan sumber daya desa termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi/keuangan untuk mencapai Indeks Desa Membangun (IDM) lebih besar dan sesuai untuk jenis desa berkembang. Diantara ketiga komponen IDM yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) nilai rendah menjadi diprioritaskan meningkat untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan (Suroso, 2020).

Indeks Desa Membangun sendiri dibuat untuk memperkuat capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019. Indeks Desa Membangun digunakan oleh sebagai acuan afirmasi, integrasi dan sinergi pembangunan. Harapannya adalah mewujudkan kondisi masyarakat pedesaan menjadi sejahtera, adil dan mandiri.

Kecamatan Kerjo merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari Ibukota kabupaten 21 km arah utara. Kecamatan kerjo terdiri dari 10 desa, 68 dusun, 92 dukuh, 91 RW dan 281 RT. Pada tahun 2016-2020 sebagian wilayah tergolong kedalam wilayah berkembang/madya.

**Tabel 1.1 Klasifikasi Indeks Desa Membangun Kecamatan Kerjo
Tahun 2016-2020**

No	Desa	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kwadungan	0,6885	0,6463	0,5922	0,6460	0,6481
2.	Botok	0,6143	0,6461	0,6157	0,5952	0,6476
3.	Kuto	0,6976	0,6777	0,7049	0,6610	0,6778
4.	Tamansari	0,5670	0,6124	0,6179	0,6070	0,6124
5.	Tawang Sari	0,6085	0,6684	0,6798	0,6626	0,6684
6.	Karangrejo	0,6860	0,6200	0,6481	0,6146	0,6203
7.	Sumberejo	0,6891	0,6471	0,6014	0,6087	0,6495
8.	Ganten	0,6341	0,6720	0,6846	0,6701	0,6721
9.	Gempolan	0,6208	0,6512	0,7019	0,6238	0,6517
10.	Plosorejo	0,6618	0,6912	0,6509	0,6062	0,6195

Sumber: IDM, diolah

Berdasarkan tabel 1.1 menginformasikan bahwa dari 10 Desa di Kecamatan Kerjo pada tahun 2016-2020 rata-rata berkembang/madya. Adapun beberapa desa yang tertinggal beberapa tahun kebelakang. Sebagai contoh pada Desa Tamansari tahun 2016, Desa Kwadungan tahun 2018, dan Desa Botok tahun 2019 yang tergolong status desa tertinggal. Status desa berkembang dan tertinggal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu bahwa desa yang memiliki sumber daya sosial ekonomi dan ekologi yang dimilikinya dalam upaya kesejahteraan masyarakat desa belum optimal dalam pengelolaan, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Kesejahteraan merupakan sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk

melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin (Fakhrudin, 2012).

Tabel 1.2 Jumlah Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan di Kecamatan Kerjo Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	2020
1.	Kwadungan	1031
2.	Botok	762
3.	Kuto	1609
4.	Tamansari	895
5.	Tawangsari	1224
6.	Karangrejo	1668
7.	Sumberejo	994
8.	Ganten	731
9.	Gempolan	821
10.	Plosorejo	718

Sumber: Kecamatan Kerjo dalam Angka, diolah

Berdasarkan tabel 1.2 menginformasikan bahwa jumlah keluarga dengan tingkat kesejahteraan di Kecamatan Kerjo pada tahun 2020, Desa Plosorejo menduduki urutan paling bawah dengan jumlah 718. Hal ini disebabkan karena letak Desa Plosorejo jauh dari pusat ekonomi dan wilayahnya jauh dari pusat kota. Peran pemerintah harusnya difokuskan pada kondisi seperti ini guna menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan dan kesejahteraan.

Kesenjangan pembangunan kota dengan desa yang berada di perbatasan menjadi tolak ukur pemerintah (Jamaludin, 2015), kesenjangan yang dimaksudkan berupa: a. kekurangan kesempatan kerja, masyarakat

desa hanya bergantung pada satu sektor pertanian. b. Buruknya akses jalan pedesaan untuk memenuhi kebutuhan penduduk desa ke pusat kota, c. Kurangnya pelayanan medis. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa program alokasi dana desa yang dapat menjembatani kesenjangan pembangunan di desa-desa yang terpinggirkan. Oleh karena itu, diharapkan Program Dana Desa dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Desa di Kecamatan Kerjo.

Dalam rangka mendukung pemenuhan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangannya, undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang pemerintahan mengalokasikan dana desa. Dana desa dianggarkan setiap tahun dalam APBN, yang diberikan kepada setiap desa sebagai sumber pendapatan. Kebijakan ini mengintegrasikan dan sekaligus mengoptimalkan APBN untuk desa yang ada.

Pelaksanaan pengelolaan dana desa harus mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang tidak mengorbankan kepentingan publik. Pengalokasi dana desa kepada kabupaten/kota berdasarkan jumlah desa dengan memperhitungkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa digunakan untuk pembiayaan pemerintah desa dengan prioritas

untuk mendukung program pembangunan dan peningkatan desa masyarakat desa (Fitri, 2015).

Dari berbagai uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upaya program dana desa terhadap kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga manfaat dari penelitian ini selain memberikan sumbangsih pemikiran untuk perkembangan disiplin ilmu administrasi publik, juga memberikan pemikiran dan informasi bagi instansi terkait.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak adanya kebijakan Dana desa terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program dana desa terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah tersusunnya hasil riset tentang pengaruh program Dana Desa dari pemerintah, dimana hasil tersebut berguna bagi Pemerintah Daerah untuk

melihat pengaruh program pembangunan wilayah berbasis Dana Desa di Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar.

E. Metode Penelitian

E.1. Alat dan Model Penelitian

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel pada 10 desa/kelurahan di Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar dalam rentang waktu 5 tahun sehingga model ekonometrika dalam penelitian ini ditulis sebagai berikut:

$$IDM_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log (DD)_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$\log (TKS)_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log (DD)_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

IDM_{it}	= Indeks Desa Membangun
DD_{it}	= Dana Desa
TKS_{it}	= Tingkat Kesejahteraan (KS I+KS II+KS III+KS III+)
i	= Desa ke-I (<i>cross section</i>)
t	= Tahun (<i>time series</i>)
β_0	= Konstanta
β_1	= Koefisien Regresi
ε	= <i>Error Term</i> (Faktor kesalahan)
log	= Operasi Logaritma

E.2. Data dan Sumber

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Dana Desa, data IDM (Indeks Desa Membangun), dan data Tingkat Kesejahteraan di Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar tahun 2016-2020. Data tersebut diperoleh dari Sistem informasi desa (Kemendesa), IDM (Indeks Desa Membangun), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPERMADES), dan Badan Pusat Statistik.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang tinjauan teori yang relevan dengan penelitian dan menjadi dasar acuan teori untuk menganalisis masalah dalam penelitian, menjelaskan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, serta menetapkan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang ruang lingkup penelitian, jenis data dan sumber data, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi daerah penelitian, sebaran kategori pembangunan wilayah dan Perolehan Dana Desa serta pengaruh dengan kemandirian daerah di masing-masing Kecamatan Kerjo di Karanganyar, analisis data, hasil analisis data, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik untuk objek penelitian ataupun penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN